

# Air Mancur Menari Siap Perindah Taman Kota Lumintang

★ Berbentuk Kipas Dilengkapi LED, Sound System, dan Animasi

DENPASAR, NusaBali

Masyarakat Kota Denpasar kini akan kembali dimanjakan dengan hiburan menarik di Taman Kota Lumintang. Sebuah atraksi air mancur menari akan segera diwujudkan Pemkot Denpasar melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) di Taman Kota Lumintang. Ini menjadi deretan hiburan menarik di ruang terbuka hijau Kota Denpasar. Air mancur menari selama ini tidak saja dapat dinikmati masyarakat di Patung Catur Muka, namun pembangunan air mancur menari di Taman Kota Lumintang ini nantinya dapat menjadi hiburan masyarakat dalam mengisi hari senggang menikmati olahraga, beraktivitas bersama keluarga di tengah Taman Kota Lumintang.

Kepala DKP Kota Denpasar Ketut Wisada didampingi Kabid Pertamanan DKP Eka Jayana, Jumat (11/9), mengatakan pembangunan air mancur ini diharapkan dapat memecah konsentrasi masyarakat Kota Denpasar yang saat ini hanya terkonsentrasi di kawasan Lapangan Puputan Badung. Pada sisi timur Kota Denpasar bukan hanya Patung Titi Benda yang telah dipermak DKP, namun Taman Kota Denpasar yang terletak di Jalan Gatsu Barat, Lumintang, ini juga akan



• NUSABALI/NOVI ANTARI

KOLAM air di Taman Kota Lumintang, Denpasar Utara, ini akan diperindah dengan air mancur menari, lengkap dengan LED, sound system, serta animasi.

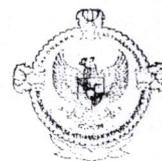
dipercantik dengan berbagai hiasan khususnya air mancur menari.

Pengerjaan proyek ini akan dilakukan oleh CV Kabi Karya Permai sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar Rp 3,3 miliar lebih dari nilai pagu paket kegiatan sebesar Rp 3,5 miliar. Pengerjaan proyek ini telah mulai dari 24 Agustus lalu yang diawali dengan pembersihan kawasan kolam dan berakhir pada Desember

mendatang. Pengerjaan air mancur mencakup pemasangan LED, sound system, dan animasi. Pembangunan air mancur akan berbentuk kipas, yang langsung berfungsi sebagai screen serta ditayangkan sosialisasi berkaitan dengan kesenian Bali maupun soal pelayanan publik hingga program pemerintah. "Air itu berfungsi sebagai screen-nya. Kami akan format sesuai nuansa Bali," paparnya. **n**

Edisi : Senin, 14 September 2015

Hal : 3

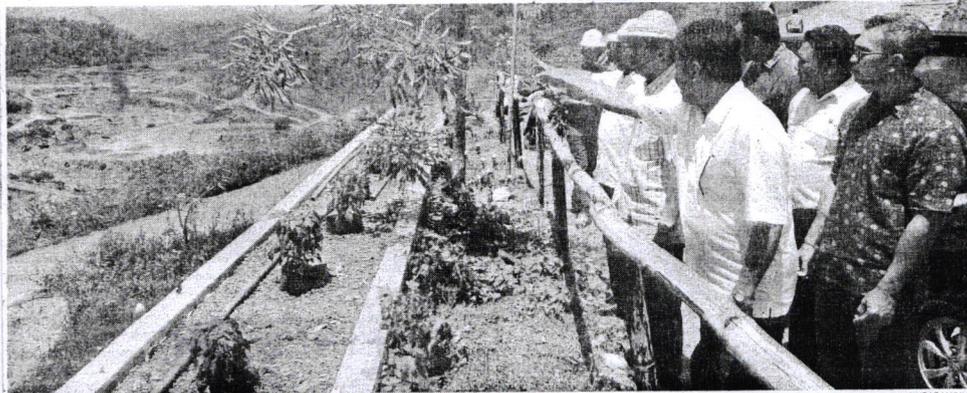


# Bendungan Titab Ditarget Operasi November

★ Gubernur Pastika Pantau

Proses Pembangunan

Proyek bendungan yang progresnya sudah mencapai 95 persen ini selain suplai air untuk 3 kecamatan, juga akan pasok listrik untuk sejumlah daerah terpencil di sekitarnya.



KUNJUNGAN Gubernur Bali Made Mangku Pastika, ke Bendungan Titab dan beberapa desa di Kecamatan Busungbiu dan Seririt memonitoring program Gerbangsadu dan Simantri.

SINGARAJA, NusaBali

Gubernur Bali Made Mangku Pastika, kembali menyambangi dan mengecek kelangsungan sejumlah program pemerintah provinsi di tanah kelahirannya, Buleleng. Kali ini kedatangannya adalah untuk memantau langsung kesiapan penggunaan dan proses pembangunan Bendungan Titab yang sudah rampung 95 persen. Gubernur juga menyempatkan diri untuk memonitoring program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) dan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) di Desa Subuk dan Titab, Kecamatan Busungbiu, Desa Telaga dan Ularan di Kecamatan Seririt, Buleleng.

Menurut Pastika ditemui di tengah acara pemeriksaan, melihat pembangunan bendungan seluas 68 hektare tersebut yang mulai rampung, jika tidak ada halangan akan mulai beroperasi pada bulan November mendatang. Bendungan yang berada di wilayah enam desa di Kecamatan Seririt dan Busungbiu tersebut, nantinya dapat menampung air sebanyak 12 juta meter kubik. Yang akan dimanfaatkan untuk irigasi pertanian di daerah sekitarnya, seluas 1794,82 hektare,

dan mengairi tiga kecamatan, yakni Banjar, Busungbiu dan Seririt.

"Nanti setelah bendungan ini beroperasi, akan menjadi bendungan yang sangat vital bagi tiga kecamatan di Buleleng. Selain nanti digunakan untuk kebutuhan irigasi, sesuai dengan kapasitas penampungannya juga dapat menyuplai air di tiga kecamatan yang ada di

Buleleng," ujar Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, Minggu (13/9) kemarin.

Bendungan Titab, yang dinilainya sebagai bangunan yang sangat vital tersebut, selain akan mengatasi masalah air, juga akan menambah energi listrik sebesar 2 X 0,75 MW. Sejumlah energi listrik tersebut pun akan disalurkan ke beberapa daerah pelosok di Kecamatan Busungbiu, yang saat ini masih terkendala masalah pengadaan listrik. Keberadaan Bendungan Titab, selain disiapkan untuk mengatasi masalah

irigasi pertanian, penyediaan air bersih, pembangkit listrik juga akan diarahkan untuk pengembangan pariwisata.

Sementara itu, dalam kunjungannya memonitoring program Gerbangsadu dan Simantri di empat desa Kecamatan Busungbiu dan Seririt, ditemukan beberapa permasalahan. Beberapa desa pun mengaku mengalami kekurangan modal, dari bantuan program Gerbangsadu yang dialokasikan sebesar Rp 1 miliar per desa.

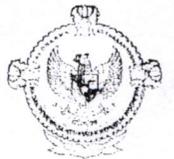
"Dalam program Gerbangsadu dan Simantri dari Pemprov Bali,

sudah berjalan dengan baik. Tidak hanya pemberian modal sebesar Rp 1 miliar, tetapi dimonitoring juga apakah sudah berjalan dengan baik, sudah berhasil apa gagal. Sehingga visi misi Pemprov Bali untuk mengentaskan kemiskinan dapat dikawal dengan baik," imbuh dia.

Sementara untuk masalah kekurangan modal, ia pun memberikan jalan keluar kepada desa bersangkutan untuk mencari pinjaman dari Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di Bank BPD Bali. @ k23

Edisi : Senin, 14 September 2015

Hal : 4



## Jatiluwi Dikoyak, Dewan Pun Geram

TABANAN, NusaBali

Kalangan DPRD Tabanan ikut geram atas aksi buldoser pemerataan tanah untuk lahar parkir yang caplok jalur hijau di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwi, Desa Jatiluwi, Kecamatan Penebel. Meski diklaim atas kesepakatan desa adat dan desa dinas, tidak seharusnya parkir

dibangun di areal persawahan produktif dengan melanggar jalur hijau, apalagi ini mengganggu view (pemandangan) keindahan sawah.

Salah seorang anggota DPRD Tabanan menyebut masih ada lokasi yang bagus untuk atasi kreditnya parkir kendaraan di DTW Jatiluwi, yakni lahan kosong di sebelah barat Pura Dalem. "Paling tepat

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

## Jatiluwi Dikoyak, Dewan Pun Geram

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

parkir dibangun di sebelah barat Pura Dalem. Lokasi itu tak mengganggu view persawahan dan pegunungan," ujarnya di Tabanan, Minggu (13/9).

Jika membangun parkir di depan pos pantau karcis sebagaimana terjadi saat ini, justru merusak keindahan destinasi Jatiluwi itu sendiri. Disebut merusak keindahan, karena dibangun di jantung objek wisata. Padahal, dari lahan yang dikeruk itu, terlihat keindahan terasering persawahan.

"Yang kami sesalkan, pengadaan parkir ini justru didompleng pembangunan restoran di belakangnya. Kami sempat curiga, siapa yang mau beri lahannya secara cuma-cuma, apalagi seluas 20 are? Pasti ada bisnis terselubung di dalamnya.

Ternyata benar, dari pemberitaan yang kami baca, akan dibangun restoran di belakang areal parkir tersebut," sesalnya.

Ketua DPRD Tabanan, Ketut Boping Suryadi, juga mengaku terusik karena jalur hijau di kawasan DTW Jatiluwi dicaplok untuk pembangunan areal parkir digondoli pembangunan restoran. Menurut Boping Suryadi, Pemkab Tabanan harus segera ambil sikap.

"Apa ini sudah menjadi pembahasan dan persetujuan bersama untuk menjaga Jatiluwi sebagai kawasan Warisan Budaya Dunia? Pemkab harus mediasi semua kepentingan, tidak bisa jalan sendiri. Pemkab harus segera berperan dan bersikap," tandas mantan ketua DPC PDIP Tananan ini. Menurut Boping Suryadi, Dewan akan turunkan tim untuk mengecek

langsung kondisi lapangan di DTW Jatiluwi.

Sementara itu, Bendesa Adat Jatiluwi, I Wayan Yasa, menegaskan pembangunan areal parkir itu sudah menjadi kesepakatan antara desa dinas, desa adat, BPD, LPM, subak, dan Badan Pengelola DTW Jatiluwi. Menurut Wayan Yasa, parkir sangat mendesak dibangun di Jatiluwi, karena pada bulan-bulan tertentu ketika kunjungan meningkat, justru kewalahan parkir.

Tidak adanya parkir representatif, selain memicu kredit, juga memberi kesan tak nyaman bagi wisatawan. "Ketika kunjungan membludak, kami terpaksa berlakukan sistem buka tutup. Kami yang di lapangan kredit atur parkir, makanya kami putuskan buat parkir refrenstatif," dalih Wayan Yasa saat dikonfirmasi NusaBali terpisah,

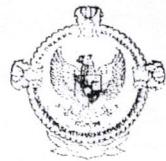
Minggu kemarin.

Wayan Yasa mengaku sudah siapkan pararem untuk amankan jalur hijau lainnya agar tak dicaplok lagi untuk pembangunan akomodasi pariwisata di DTW Jatiluwi. "Kami memang melanggar karena membangun di areal jalur hijau. Kami buat pararem, setelah ini (lahan parkir) tak boleh lagi membangun di jalur hijau. Pokoknya, tak boleh lagi membangun di jalur hijau," janjinya.

Sedangkan Asisten II Setkab Tabanan, Wayan Miarsana, berjanji akan turun lagi bersama timnya ke DTW Jatiluwi. Dalam cek lokasi ke lapangan nanti, petugas dari Bappeda Tabanan juga disertakan. Pihaknya akan turun membawa alat GPS untuk mengukur zona Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilanggar k21

Edisi : Senin, 14 September 2015

Hal : 1 dan 15



## Penagihan Piutang Pajak Temui Kendala

SINGARAJA, NusaBali

Penagihan piutang pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terbentur kendala yang pelik. Akibatnya, piutang pajak yang diperkirakan mencapai puluhan miliar tersebut selalu muncul tiap tahunnya. Dinas Pendapatan (Dispenda) Buleleng pun berencana memvalidasi data wajib pajak (WP).

Informasi yang dihimpun Minggu (13/9) menyebut, piutang PBB P2 tersebut merupakan warisan dari Kantor Pelayanan Pajak, sebelum pemungutan pajak PBB dialihkan ke daerah. Diperkirakan Dispenda yang mendapat tanggungjawab memungut PBB, hanya mampu menaggih kurang lebih 20 persen dari total piutang yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Kondisi itu akibat kendala pelik yakni data WP masih kurang akurat. Dimana salah satunya, obyek pajak sudah berpindah tangan berkali-kali, namun pemilik pertama masih tercatat dalam SPPT.

Kepala Dispenda Buleleng Ida Bagus Puja Erawan yang dikonfirmasi tidak menampik kondisi tersebut. Ia mengakui kendala dibawah yakni sulitnya melacak identitas WP dan objek pajak karena tidak

dilakukan penyesuaian dengan fakta riil di lapangan. "Misalnya satu bidang tanah yang sudah lama dijual oleh pemiliknya, namun karena tidak dilaporkan kepada aparat terdekat, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) nya tetap saja diterbitkan atas nama pemilik pertama. Karena tidak merasa memiliki obyek pajak itu, sehingga pemilik ini membiarkan saja dan otomatis memunculkan piutang PBB-P2 dan bahkan nilainya semakin bertambah," kata mantan Sekretaris DPRD Buleleng ini.

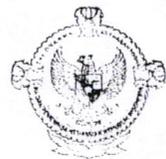
Menurut Puja Erawan, untuk mengoptimalkan lagi penagihan piutang pajak itu, pihaknya saat ini akan memvalidasi ulang subyek dan obyek piutang PBB di Bali Utara. Validasi ini penting dilakukan untuk menghitung persentase piutang PBB-P2 yang potensial ditagih. Sebaliknya, piutang PBB-P2 yang sama sekali tidak memungkinkan untuk ditagih juga akan diketahui. Berdasarkan hasil validasi ini, Dispenda akan focus untuk menggenjot penagihan piutang yang memungkinkan dapat ditagih. Sedangkan piutang PBB yang tidak memungkinkan dapat ditagih, maka akan diambil upaya lanjutan seperti penghapusan piutang PBB.

"Berapa persen PBB yang potensi ditagih dan berapa persen PBB yang tidak bisa ditagih. Kalau itu piutangnya macet yang tidak bisa ditagih dan dibuktikan dengan data riil di lapangan, maka piutangnya akan dihapuskan," jelasnya.

Di sisi lain Puja mengatakan, selain fokus menggarap penagihan piutang PBB, validasi ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat WP untuk melakukan perbaikan identitas subjek dan objek PBB-nya yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Di samping itu, masyarakat WP juga bisa mengajukan keringanan PBB khususnya objek PBB berupa lahan pertanian. Apalagi, akhir-akhir ini lahan pertanian ini banyak yang terkena dampak naiknya pajak yang mereka bayar akibat banyaknya lahan yang telah beralihfungsi dari lahan pertanian menjadi bangunan. "Setelah data WP ini berhasil kita validasi, maka piutang pajak yang bisa tagih dan tahun berikutnya tidak lagi muncul piutang. Dan naiknya pajak akibat banyak lahan sawah yang beralihfungsi ini bisa memohon keringanan pajak sesuai komitmen pemerintah daerah," imbuh Puja Erawan. **k19**

Edisi : Senin, 14 September 2015

Hal : 4



BUPATI Jembrana I Putu Artha meninjau sejumlah proyek pembangunan sembari gowes di seputaran Kota Negara, Jumat (13/9). • IST

## Sidak Proyek, Kualitas jadi Sorotan

NEGARA, NusaBali  
Sembari gowes, Bupati Jembrana, I Putu Artha, melakukan sidak ke sejumlah proyek di kawasan Kota Negara, Jumat (13/9). Dalam sidak itu, Bupati Artha soroti kualitas proyek tersebut. Proyek yang disidak yakni pembangunan revitalisasi Pasar Umum Jembrana dan pembangunan drainase di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, pembangunan trotoar di Pasar Tnten, di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, dan di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana.

Saat mengunjungi proyek pembangunan revitalisasi Pasar Jembrana, sejumlah pekerjaan jadi sorotan tajam. Salah satunya saluran air limbah yang belum dikerjakan. Diingatkan, agar saluran air harus dibuat bagus agar mengalir dengan baik, dan mengintegrasikan seluruh pipa air yang mengalir ke dalam pasar supaya tidak semrawut. "Percuma kalau pasarnya bagus tapi saluran airnya kotor dan jorok," kata Bupati Artha.

Sementara saat meninjau proyek drainase normalisasi banjir sepanjang 300 meter, Bupati Artha menugaskan Kepala Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, untuk selalu mengawasi

proyek tersebut. Lahan sempadan drainase yang merupakan tanah Negara, diminta dibuatkan pertamanan. Begitu juga saat meninjau pembangunan trotoar Pasar Tnten, Bupati Artha meminta penjelasan pengawas soal campuran koral. Pasalnya campurannya ditemukan tidak sama. "Sekarang di sini (Pasar Tnten) sudah bagus. Dulu pedagang yang hanya jualan sore, sekarang buka dari pagi sampai malam. Los yang ada juga kita minta nanti bisa dijadikan tempat pedagang burung, tidak perlu ada pungutan," perintah Bupati Artha.

Di sela-sela sidak itu, Bupati Artha yang didampingi Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, serta sejumlah Kepala SKPD Jembrana, mengaku tidak mau lagi ada proyek asal-asalan. Dinas PU Jembrana juga diingatkan betul-betul melakukan pengawasan dengan benar. Agar tahun depan, seluruh rancangan proyek yang akan dibangun, bisa bertahan lama. "Saya ingin proyek-proyek yang dibangun ini harus bertahan 10 sampai 15 tahun. Pemborong jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi utamakan kualitas. Percuma kita bangun dengan biaya besar dari uang rakyat, tapi baru setahun sudah rusak," tegas Bupati Artha. **od**

Edisi : Senin, 14 September 2015

Hal : 7